

## PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEMBANGUN SMART CITY PADA KOTA BANDUNG TAHUN 2018

### E- GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN BUILDING SMART CITY IN BANDUNG 2018

Reyhan Maulidian Salahuddin Yusuf<sup>1)</sup> Dr. Helni Mutiarsih Jumbuh, S.H., M.H.<sup>2)</sup>

Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Telkom

<sup>1)</sup>reyhanmsy@students.telkomuniversity.ac.id, <sup>2)</sup>helnimj@telkomuniversity.ac.id

---

#### Abstrak

Seiring gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, saat ini sejumlah pemerintah daerah berlomba-lomba dalam menerapkan konsep *smart city* di daerahnya. Konsep *smart city* ini merupakan perluasan dari program *e-government* yang mana memanfaatkan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik. Kondisi infrastruktur dan sistem informasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung dapat dikatakan sudah maju. Kepedulian masyarakat Kota Bandung sendiri dalam perwujudan konsep *smart city* terbilang sangat tinggi, didukung dari bantuan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi *e-government* di Kota Bandung serta perannya dalam membangun *smart city* di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *in-depth interview* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai penentuan sampel sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Kota Bandung telah terpenuhi dilihat dari berbagai sistem dan layanan yang telah diimplementasikan. Butuh penelitian lebih lanjut mengenai aspek pendukung *smart city* lainnya sehingga Kota Bandung dapat dikatakan sebagai kota berkonsep *smart city*.

**Kata Kunci:** Kota Bandung, *E-government*, *Smart City*, Analisis Miles dan Huberman

---

#### Abstract

Along with the incessant development of infrastructure in Indonesia, at a present number of regional governments competed in applying the smart city concept in their area. The smart city concept is an extension of the e-government program which utilizes Information and Communication Technology (ICT) in public services. The circumstances of infrastructure and information systems given by the Bandung City's government could be said to have advanced. The concern of the people of Bandung City itself in the realization of the smart city concept is very high, supported by the cooperation of the communities in Bandung. This study aims to see how the implementation of e-government and its role in building smart city in Bandung. This research was conducted through a qualitative approach with descriptive presentation. Data collection methods on this research were used in-depth interview using purposive sampling technique as a source of data samples. According to the results, the implementation of e-government in Bandung was fulfilled in terms of various systems and services that had been implemented. It requires further research on other supporting aspects of smart city therefore Bandung could be a capital with smart city concept.

**Keywords:** Bandung, *E-government*, *Smart City*, Miles and Huberman analysis

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, telah memberikan sebuah pola pikir dan gaya hidup yang menuntut masyarakat untuk mengikutsertakan digitalisasi pada kehidupan sehari-hari. Permintaan akan informasi menjadikan kehidupan digital sebagai salah satu kebutuhan yang dapat dikatakan kebutuhan utama dalam masa sekarang. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat dengan mudah diakses secara cepat, tepat, dan akurat menjadi salah satu dasar teknologi informasi dikembangkan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan menjadi sebuah kebutuhan utama, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi untuk masyarakat. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, serta meletakkan supremasi hukum. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, membuka peluang untuk pemanfaatan yang lebih luas. Sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.

Kota Bandung, di bawah pimpinan Walikota Ridwan Kamil, memperlihatkan keseriusannya untuk membawa jargon smart city. Berbagai proyek dan pengembangan IT sesungguhnya sudah dilakukan sejak lama dari era pemerintahan sebelumnya. Dan nampaknya, masyarakat dan berbagai pihak lainnya mulai digerakkan dan ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya smart city. Berbagai pendekatan dilakukan untuk dapat berkolaborasi mewujudkan Bandung Smart City. Mulai dari pendekatan berbasis komunitas, gotong royong, hingga menjadi sister city atau menjalin kerja sama dengan kota lain secara intensif di berbagai sektor. Program perbaikan fasilitas internet, perapihan kabel, dan juga program-program lain membuat perkembangan smart city di Bandung terbilang pesat dan positif. Secara kasat mata, semua pihak dapat melihat langsung wujud dari Bandung Smart city sehingga mendapat dukungan yang positif. Sementara itu, pemerintah juga masih tetap berbenah di semua sektor yang tidak terlihat tapi penting bagi kemajuan Kota Bandung.

Seiring gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, saat ini sejumlah pemerintah daerah berlomba-lomba dalam menerapkan konsep smart city di daerahnya. Konsep smart city ini merupakan perluasan dari program e-government yang mana memanfaatkan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik. Dengan melihat dari problematika yang telah dijabarkan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi dan penerapan electronic government dalam membangun smart city pada Kota Bandung.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian

#### 2.1.1 E-Government

Menurut Indrajit (2006: 8), e-government merupakan suatu mekanisme baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), dimana melibatkan implementasi dari teknologi informasi, dengan bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Dengan kata lain, e-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas dari layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif. Yang mana intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

#### 2.1.2 Empat Tipe Relasi E-Government

##### a. Government to Citizens (G2C)

Tipe ini merupakan aplikasi paling umum pada e-government. Dengan membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi, pemerintah bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakatnya.

##### b. Government to Business (G2B)

Agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya maka pemerintah dituntut untuk dapat membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis seperti perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

##### c. Government to Government (G2G)

Kebutuhan bagi negara-negara untuk berkomunikasi secara intens dari hari ke hari sangat terlihat jelas di era globalisasi saat ini. Kebutuhan berkomunikasi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya bertujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan hal lainnya.

##### d. Government to Employee (G2E)

Aplikasi e-government juga diperuntukkan dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri maupun karyawan pemerintah yang berkerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

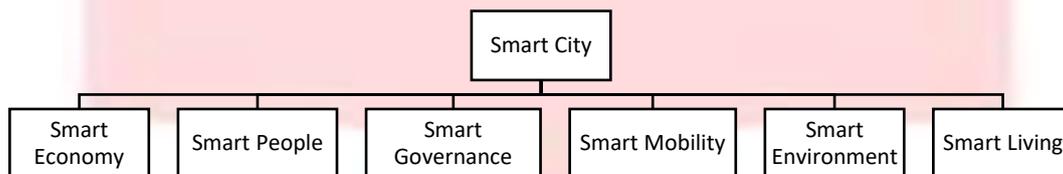
### 2.1.3 Smart City

Smart city atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari pendekatan smart city adalah untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.

### 2.1.4 Dimensi Smart City

Smart city memiliki tiga dimensi utama di mana ketiga dimensi ini akan saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun ketiga dimensi smart city tersebut adalah *Technology*, *People*, dan *Community* (Pratama, 2014 : 111).

### 2.1.5 Enam Jenis Pembagian Smart City



Gambar 2.1 Enam Pembagian *Smart City* menurut IBM  
Sumber: Pratama 2014:104

Amerika Serikat dan Eropa merupakan pelopor smart city di dunia. Salah satu perusahaan yang ikut andil dalam menjadi pelopor adalah IBM. IBM merupakan perusahaan enterprise kelas dunia yang mewadahi berdirinya smart city. IBM membagi smart city menjadi enam jenis pembagian.

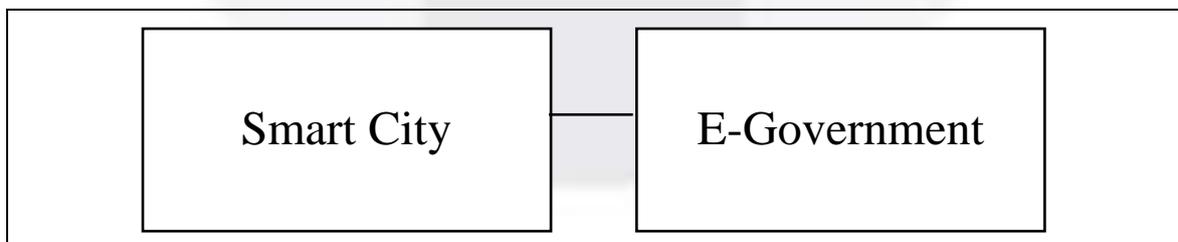
### 2.1.6 Area Prioritas Bandung Smart City

Bandung menerapkan konsep smart city dengan julukan yang dikenal dengan Bandung Smart City. Penerapannya dimulai semenjak Ridwan Kamil menjabat sebagai Walikota Bandung. Pada penerapannya, Bandung Smart City memiliki sepuluh area prioritas. Adapun sepuluh area tersebut adalah:

- 1) Government (Smart Government)
- 2) Education (Smart Education)
- 3) Transportation (Smart Transportation, Smart Parking)
- 4) Health (Smart Health)
- 5) Energy (Smart Grid/ Smart Energy)
- 6) Security (Smart Surveillance)
- 7) Environment (Smart Environment)
- 8) Community/ Social (Smart Society, Smart Reporting, Bandung Passport)
- 9) Finance (Smart Payment)
- 10) Trading (Smart Commerce)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sekarang dalam Sugiyono (2012:93) mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka teoritis merupakan fondasi dimana seluruh proyek penelitian didasarkan.



Gambar 2.2 Kerangka Penelitian  
Sumber: Olahan Peneliti

### **2.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah in-depth interview dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai penentuan sampel sumber data. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik keabsahan triangulasi menggunakan software MAXQDA 2018.

## **3. Pembahasan**

### **3.1 Profil Narasumber**

Pada penelitian ini, terdapat 3 kategori narasumber. Yaitu, Pemerintah Kota Bandung, Pengembang Layanan, dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

### **3.2 Penerapan Electronic Government di Kota Bandung**

Semenjak konsep smart city diterapkan di Kota Bandung pada tahun 2014, hingga sekarang kurang lebih terdapat 300 aplikasi yang telah dikembangkan dan berjalan di instansi maupun dinas yang ada di Kota Bandung. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah keseluruhan dari layanan yang dibangun sendiri oleh pemerintah kota dan juga ada yang dibangun oleh instansi lain dan juga tidak ketinggalan dari pemerintah pusat. Aplikasi dan layanan tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik tanpa harus pergi ke instansi maupun dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kota, diperoleh bahwa motivasi penerapan electronic government sendiri adalah untuk mempermudah urusan pelayanan. Karena tujuan dari pemerintahan adalah pelayanan terhadap masyarakat. Berbeda dengan perusahaan yang tujuannya untuk mencari profit. Maka dari itu manfaat yang ingin dicapai adalah peningkatan pelayanan publik. Tidak hanya untuk di Kota Bandung saja, manfaat dari penerapan electronic government intinya memang sebagai pembantu untuk mengefisienkan pelayanan publik.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diambil kesimpulan dari hasil coding yang menunjukkan terdapat 6 respon mengenai penerapan e-government dari keseluruhan narasumber. Dari hasil tersebut, didapat bahwa penerapan e-government di Kota Bandung saat ini sudah dijalankan. Tapi masih banyak kendala yang dialami. E-government membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat pekerjaan yang manual dengan bantuan teknologi informasi.

**Daftar Pustaka**

- [1] Indrajit, Prof. Richardus Eko. (2006). *Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Aptikom.
- [2] Pratama, I Putu Agus Eka. (2014). *Smart City Beserta Cloud Computing dan Teknologi-Teknologi Pendukung Lainnya*. Bandung: Informatika
- [3] Techinasia (2015), *Langkah Bandung dalam Mengimplementasikan Smart City* [online] <https://id.techinasia.com/bandung-smart-city> [accessed february 17th, 2018]
- [4] Arjita, Utami Andri (2017). *E-Government Sebagai Bagian Dalam Smart City*. 2nd Seminar Nasional IPTEK Terapan (SENIT) 2017.
- [5] Elysia, Wihadanto, Sumartono (2017). *Implementasi e-Government untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi di Indonesia. Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [6] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- [7] Indrawati. 20015. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bandung:PT Refika Aditama.
- [8] Sugiyono, Prof. Dr. (2017), *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Cetakan ke-25. Bandung: CV Alfabeta